



## **Hegemoni Amerika Serikat di Afghanistan: Economic Turmoil and Food Insecurity Dilemma**

Agung Tri Putra

Universitas Indonesia, Indonesia; Email: [agungtriputra@outlook.com](mailto:agungtriputra@outlook.com)

Bayu Priambodo

UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia; Email: [bayu.p.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:bayu.p.adneg@upnjatim.ac.id)

Singgih Manggalou

UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia; Email: [singgih.m.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:singgih.m.adneg@upnjatim.ac.id)

Ervan Kus Indarto

Universitas Airlangga, , Indonesia; Email: [ervan.kus.indarto@fib.unair.ac.id](mailto:ervan.kus.indarto@fib.unair.ac.id)

| Submit: 06-06-2023 | Accept: 29-08-2023 | Publish: 31-08-2023 |

### **Keywords**

*Hegemony, Food Insecurity,  
Power, Taliban*

### **ABSTRACT**

*Afghanistan is a country with the highest level of food insecurity in the world. This study attempts to combine theory of international relations and data analysis of food insecurity through the FIES (Food Insecurity and Experience Scale) approach in analyzing relations between food insecurity and external factors. This research method is descriptive qualitative and analyzed using Antonio Gramsci's hegemonic theory. The results of the study show that Afghanistan is considered a problem for the United States as a hegemon. The United States uses all kinds of threats and sanctions to bring Afghanistan under its control, causing food insecurity.*

### **Kata Kunci**

Hegemoni, Kerawanan Pangan,  
Kekuasaan

### **ABSTRAK**

Afghanistan merupakan negara dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi di dunia. Penelitian ini melakukan kombinasi teori dalam Hubungan Internasional dan data analisis kerawanan pangan melalui pendekatan FIES (Food Insecurity and Experience Scale) untuk menganalisis kaitan antara kerawanan pangan dan faktor eksternal. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan dianalisa menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Afghanistan dianggap sebagai sebuah masalah bagi negara Amerika Serikat sebagai hegemon. Amerika Serikat menggunakan segala macam ancaman dan sanksi untuk membuat Afghanistan tunduk di bawah kekuasaannya, yang mengakibatkan munculnya kerawanan pangan.

## PENDAHULUAN

Peristiwa 9/11 tahun 2001 menjadi sebuah pijakan besar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, negara ini menyatakan War on Terror (WoT) sebagai kebijakan utama yang digunakan AS terhadap negara-negara yang dipandang AS pelindung gerakan-gerakan terorisme. Banyak negara di Timur Tengah/Asia, seperti Irak, Yaman, dan Afghanistan terdampak kebijakan WoT ini. Irak diinvasi AS secara militer, begitu juga Afghanistan. Penelitian ini akan berfokus pada upaya hegemoni internasional Amerika Serikat di Afghanistan sehingga menciptakan kerawanan pangan dan bencana ekonomi yang besar.

Sejak masuknya pasukan Amerika Serikat di Afghanistan, negara ini mengalami banyak masalah, khususnya dalam kestabilan ekonomi, pangan dan politik dalam negeri. Hingga saat ini Afghanistan tidak dapat memperbaiki perekonomiannya, bahkan negara ini menderita kerawanan pangan akut pada 93% penduduknya (Venditti, 2021). Secara total terdapat sekitar 40,4 juta populasi mengalami kekurangan akses terhadap pangan dalam negeri maupun luar negeri. Kelaparan menjadi faktor utama yang diperhatikan oleh Human Right Watch (2021) yang menyebutkan bahwa akses terhadap perbankan di Afghanistan terhambat oleh dibekukannya aset internasional negara itu oleh AS. Sebesar sembilan miliar dolar aset Afghanistan di Amerika Serikat dibekukan, begitu juga dengan arus investasi dari luar negeri juga tidak dapat masuk karena kredensial dari Bank Sentral Afghanistan diblokir oleh Bank Dunia. Pemblokiran tersebut disebabkan oleh perang sipil yang terus berlangsung hingga pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban di tahun 2021. Pada waktu yang sama, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menarik semua kepentingan internasionalnya dari Afghanistan.

Penarikan kepentingan Amerika Serikat di Afghanistan seolah menjadi pisau bermata dua, secara positif penarikan pasukan berarti

tidak lagi ada intervensi asing di negara tersebut. Akan tetapi, pendudukan Amerika Serikat di Afghanistan sebelumnya telah menjadi salah satu instrumen kuat dalam menyuplai bantuan asing dari negara tersebut melalui beragam institusi amal. Sehingga dengan keluarnya Amerika Serikat dari Afghanistan, bantuan internasional sangat sulit untuk masuk, apalagi dengan predikat Amerika Serikat sebagai negara hegemoni. Melalui akses yang dimiliki hegemon Amerika Serikat, negara ini seolah berusaha untuk menundukkan Afghanistan dengan melakukan blokade secara ekonomi dan lainnya.

(Eric Dago 2021) melihat faktor utama ketahanan pangan adalah konflik bersenjata dimana penelitian (Mazhar Mughal, 2020) memperlihatkan bahwa Asia Selatan merupakan daerah yang memiliki ketahanan pangan yang rendah dibandingkan asia lainnya karena sedang terjadi konflik bersenjata. Penelitian ini juga diperkuat oleh (Akbar et al, 2020) yang melihat bahwa faktor ekonomi, pendidikan dan sosial menjadikan asia selatan sangat rawan ketahanan pangan.

Berbagai penelitian di atas melihat bahwa ketahanan pangan disebabkan oleh faktor internal sehingga penulis melihat bahwa belum ada yang melihat ketahanan pangan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana jika ketahanan pangan disebabkan oleh faktor eksternal utamanya adalah Negara Amerika Serikat. Penulis dalam penelitian ini memanfaatkan teori dalam hubungan internasional dan data analisis kerawanan pangan melalui pendekatan FIES (Food Insecurity and Experience Scale). Dengan menjelaskan dua pendekatan tersebut, penelitian ini dibuat untuk menjadi sebuah pandangan paradigma hubungan antar negara dalam konteks internasional yang terus mengalami dinamika sehingga mengarahkan pada peran Amerika Serikat sebagai sebuah negara hegemoni.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### Hegemoni Amerika

Antonio Gramsci adalah pemapar pertama teori hegemoni, ia menjelaskan bahwa konsep hegemoni merupakan upaya untuk melakukan penundukan/hegemoni terhadap kelas-kelas yang dinilai berada dibawahnya. Gramsci menjelaskan bahwa terdapat tiga tingkatan dalam hegemoni yaitu: (1) hegemoni total; (2) hegemoni *declining*; (3) hegemoni minimal melalui penguasaan terhadap elit baik dalam sektor ekonomi maupun politik. Pada konteks hubungan internasional, Robert Keohane mendefinisikan hegemoni sebagai usaha untuk memiliki kekuatan terbesar sebagai sebuah instrumen tekanan dan manipulasi kepada negara lain (Dirzauskaite dan Ilinca, 2017). Sedangkan definisi lainnya menurut Stiles (2009) dalam Dirzauskaite dan Ilinca (2017) adalah keunggulan suatu negara bila dibandingkan dengan negara lainnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hegemoni dijelaskan oleh Robert Keohane meliputi dua kekuatan yaitu: (1) *hard power*, menekankan pada usaha secara militer dan kekerasan untuk membuat dominasi terhadap negara tujuannya; (2) *soft power*, merupakan instrumen lunak seperti perangkat ekonomi dan juga diplomasi untuk mendapatkan keunggulan melalui kepentingan nasional negaranya.

Dalam konteks aktor dalam hubungan internasional, hegemon erat kaitannya dengan dua hal yang tidak boleh dilanggar sebagai sebuah karakteristik yaitu: (1) memiliki kemampuan untuk melakukan hegemoni melalui instrumen yang dimiliki; (2) tidak dipaksa (kemauan) sebagai pemimpin negara yang berada di bawahnya. Amerika Serikat memenuhi dua syarat tersebut, melalui kemampuan militernya yang berada dalam list pertama *Global Fire Power* dan kekuatan perekonomiannya sebagai kekuatan terkuat dunia. Secara konsep, hegemoni dijelaskan sebagai sebuah kekuatan dari negara untuk mengatur dunia internasional, kemudian memastikan aktor atau negara lainnya untuk

tunduk secara langsung maupun terpaksa. Teori hegemoni kemudian melalui perkembangan menjadi Neo-Gramscianism yang berfokus pada aliran perputaran ekonomi kapitalisme, sehingga dalam proses terjadinya hegemoni sangat terpaku pada arus modal dan akses perekonomian. Melalui akses perekonomian dan juga akumulasi kapital ini, negara hegemon kemudian menjadikannya instrumen untuk mendominasi melalui bantuan ekonomi atau blokade ekonomi.

Melalui pendekatan ini penulis berusaha untuk menjelaskan bahwa Amerika Serikat sebagai sebuah negara hegemon sedang melakukan tugasnya untuk menciptakan dunia internasional yang damai dan sesuai dengan keinginan dan kepentingan nasionalnya. Dalam menjelaskan klaim Amerika Serikat sebagai sebuah negara hegemon, penulis mengambil ungkapan yang tertulis dalam rilis *Department of Defense* yang megatakan bahwa:

*“... our values continue to drive the important work that American patriots are doing around the world.”*

Amerika Serikat melihat dunia Arab dan Timur Tengah secara umum merupakan wilayah konflik yang dapat mengganggu stabilitas negaranya. Oleh karena itu sebagai sebuah negara hegemon, Amerika Serikat berupaya melakukan stabilisasi melalui doktrin, nilai, ekonomi dan militer di Afghanistan.

## METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada bagaimana hegemoni Amerika terhadap Afganistan. Metode pencarian data menggunakan studi pustaka. Penulis melakukan pencarian data dari data-data yang telah terpublikasikan yang menunjukkan bagaimana hegemoni yang telah dilakukan Amerika pada Afganistan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kepentingan Nasional Amerika Serikat

Afghanistan pada 1979 dalam perang dingin banyak mendapatkan bantuan dari Uni Soviet, kemudian secara tidak langsung juga mengadopsi banyak nilai-nilai Marxis, begitu juga dengan pemerintahannya (Nuerchterlein, 1989). Sejak Uni Soviet memiliki keinginan untuk menjadikan Afghanistan pangkalan militer, maka Amerika Serikat berhati-hati menjadikan Afghanistan sebagai target operasi. Pendapat tersebut dijelaskan dalam jurnal Nuerchterlein (1989) sebagai kepentingan *near-vital U.S. interest*. Sesaat setelah 1980, pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk mengimbangi dengan memberikan paket bantuan ekonomi ke Pakistan yang berbatasan langsung dengan Afghanistan dan memberikan bantuan militer kepada pemberontak di Afghanistan. Afghanistan merupakan salah satu negara yang dapat mengganggu kepentingan nasional Amerika Serikat Nuerchterlein (1989). Secara langsung maupun tidak, Amerika Serikat melakukan kategorisasi kepentingannya di Afghanistan sebagai: (1) *threat*, melalui potensi masalah yang ditimbulkan kelak pada *defense of homeland*; (2) dapat dipengaruhi secara perekonomian untuk *well-being*; (3) *favorable influence in world order*; dan (4) *promotion of value*, dalam penerapan demokrasi liberal.

**Gambar 1. U.S. National Interests in Southwest Asia**

| Basic National Interests | Intensity of Interests |       |          |                         |
|--------------------------|------------------------|-------|----------|-------------------------|
|                          | Survival               | Vital | Major    | Peripheral              |
| Defense of Homeland      |                        |       |          | Pakistan<br>Afghanistan |
| Economic Well-being      |                        |       |          | Pakistan<br>Afghanistan |
| Favorable World Order    |                        |       | Pakistan | Afghanistan             |
| Promotion of Values      |                        |       |          | Pakistan<br>Afghanistan |

Sumber: U.S. Strategy for Pakistan and

### Afghanistan (2010)

Pemberian bantuan secara militer dan ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat lazim digunakan untuk memberikan pengaruh dalam Perang Dingin yang terjadi saat itu. Di tahun 1988, terjadi perjanjian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menyatakan bahwa akan ada penarikan pasukan dari Afghanistan, membuat Amerika Serikat dapat masuk mempengaruhi Afghanistan melalui bantuan ekonomi. Momen tersebut menjadi salah satu momen pertama kalinya Amerika Serikat memberikan *respect* kepada Afghanistan dalam dinamika hubungan internasional.

Pada tahun 2001 Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan invasi terhadap Afghanistan, alasan utama yang dijelaskan oleh pemerintahan Bush adalah untuk melakukan *War on Terror* (WoT). Lebih lanjut menurut penjelasan dokumen *U.S. Department of Defense* (2022) adalah untuk mengemban tugas penting pertahanan nasional Amerika Serikat. Secara umum publik juga mengenalnya sebagai perang terhadap Al-Qaeda yang merupakan otak penyerangan gedung kembar *World Trade Center* (WTC) pada 11 September 2001. Amerika Serikat melalui dokumennya tersebut menyatakan bahwa hingga tahun 2001 tidak ada sebuah entitas pun yang dapat merencanakan dan melakukan tindakan yang menghancurkan hak asasi manusia dari penduduknya. Tumbangnya WTC menjadi awal tindakan tegas Amerika Serikat untuk menyerang Afghanistan.

Kepentingan nasional Amerika Serikat tidak hanya berhenti sampai invasi di Afghanistan tetapi pemerintahan AS juga mengeluarkan kebijakan luar negeri *Global War on Terror* (GWOT). Kebijakan GWOT AS berfungsi sebagai upaya penumpasan terorisme di dunia yang menghambat AS dalam memenuhi kepentingan nasionalnya di Timur Tengah. Di Afghanistan kebijakan GWOT ini dijalankan melalui misi *Operation Enduring Freedom* (OEF). Misi OEF ini digunakan untuk menegaskan kepentingan nasionalnya dalam

misi penumpasan terorisme dan promosi demokrasi sebagai cita-cita utamanya. (Syukur & Claudia Karina, 2021).

Kepentingan nasional Amerika Serikat juga ditunjukkan dalam bidang ekonomi dimana hubungan bilateral ekonomi AS dan Afganistan dimulai dengan menandatangani kerja sama perdagangan dan investasi di tahun 2004. TIFA adalah forum utama untuk diskusi perdagangan dan investasi bilateral antara kedua negara. Ekspor dari Amerika Serikat ke Afghanistan meningkat 525% dari \$150 juta pada 2004 menjadi \$937 juta pada 2017. Implementasi undang-undang dan kebijakan baru yang sesuai dengan WTO akan meningkatkan lingkungan bisnis dan rezim perdagangan Afghanistan, dan memberikan kerangka hukum internasional yang akan membantu lebih lanjut integrasi regional Afghanistan. Untuk meningkatkan keamanan di Afghanistan, Militer Amerika Serikat telah terlibat di Afghanistan sejak tak lama setelah serangan 9/11 di 2001. Pada 2003, NATO mengambil alih kepemimpinan United Nations-Mandated International Security Assistance Force Mission (ISAF). Pada puncaknya, ISAF mencakup lebih dari 130.000 pasukan dari 51 NATO dan negara mitra (U.S Departement of State, 2019).

Setelah pergantian rezim kepemimpinan di AS maka kepentingan nasional AS juga semakin berkurang di Afganistan apalagi ketika pemilu di AS dimenangkan oleh Partai Demokrat dimana secara ideologi lebih bertahan daripada harus menyerang ke negara luar. Pada saat Presiden Barack Obama terpilih sebagai presiden menggantikan George W. Bush, kebijakan luar negeri yang dikeluarkan akan banyak mengedepankan diplomasi khususnya terhadap negara-negara Muslim yang sempat memanas. Presiden Barack Obama juga banyak menarik tentara AS dari Irak dan Afganistan. Sehingga kepentingan AS di Afganistan sudah sangat berkurang ketika Presiden Barack Obama terpilih. Jumlah pasukan Amerika di Afghanistan yang memuncak pada 97.000 pada tahun 2011, kemudian terjadi penurunan menjadi sekitar

12.000 pada tahun 2015 dan benar-benar habis pada tahun 2021.

### Sanksi Amerika Serikat

Setelah Taliban mengambil alih kekuasaan, beberapa sanksi internasional masih juga belum dipulihkan. Salah satunya adalah pembekuan aset nasional Afghanistan yang ada di Amerika Serikat, kebijakan tersebut membuat masyarakat terhambat aksesnya terhadap perekonomian. Kemudian terdapat pembekuan kredensial oleh Amerika Serikat dan sekutunya melalui *World Bank Group* yang menyebabkan perekonomian tidak dapat berjalan lancar di Afghanistan. Akibatnya masalah pangan menjadi salah satu isu utama yang terdampak, menyebabkan 93% dari populasi mengalami kerawanan pangan akut. Jaringan bank yang diblokir kemudian membatasi akses terhadap *foreign currency reserve* Afghanistan tidak dapat dicairkan dan menghambat masuknya bantuan internasional berupa pendanaan untuk melakukan stabilisasi ulang perekonomian (VOA, 2022).

Pemblokiran bank tersebut sangat berkaitan dengan yang dijelaskan dalam pandangan Neo-Gramscian bahwa untuk mendapatkan dominasi terhadap sebuah negara tertentu maka bisa dilakukan pembekuan akses terhadap kapital. Secara tidak langsung ketika terjadi pemblokiran ekonomi, maka Afghanistan tidak dapat meningkatkan modal usaha yang dapat memutar roda aktivitas dan konsumsi di masyarakat. Padahal tujuan utamanya adalah untuk menghindari pembiayaan aktivitas membahayakan oleh Al-Qaeda maupun ISIS, namun sanksi tersebut menjadi penghancur daya tahan hidup masyarakat.

Setelah Taliban melakukan pengambilalihan kekuasaan, seharusnya sudah terdapat pemerintahan resmi untuk melakukan transisi. Akan tetapi ketika dilihat lebih jauh ke belakang, ternyata Taliban masa lalu dianggap sebagai kelompok teroris berskala global. Oleh karena itu hingga saat ini pemerintahan Taliban belum banyak diakui oleh negara-negara didunia. Selain sanksi



ekonomi dari Amerika Serikat, Afghanistan sebagai mendapatkan sanksi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa berupa *travel ban* juga embargo secara militer. Sanksi PBB dituangkan dalam artikel 133 mengenai pelarangan suplai alat perang kepada negara maupun individu di Afghanistan, sedangkan Uni Eropa melakukan sanksi terhadap impor senjata dan juga secara blokade ekonomi (Tierney, 2005).

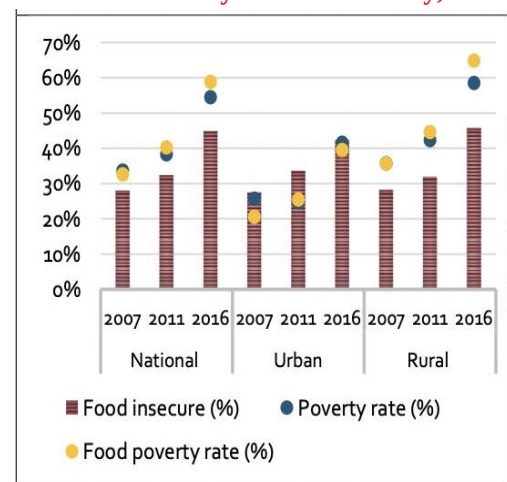
Teori Hegemoni menjelaskan bahwa sebagai salah satu tugas hegemon adalah untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Akan tetapi dalam pandangan realisme yang juga terkait dengan negara menyatakan bahwa sebuah negara merupakan serigala bagi negara lainnya. Oleh karena itu dalam melakukan hegemoni, Amerika Serikat juga mementingkan kepentingannya sendiri seperti melakukan eksploitasi minyak dan sumberdaya lainnya. Bila dilihat dari sudut pandang hubungan internasional, kebijakan embargo negara-negara di dunia dan PBB terwujud seperti dua belah mata pisau. Saat embargo dijalankan maka peluang untuk pemberontakan atau usaha untuk melakukan insurgensi akan dapat diminimalisir, namun di sisi lain, menciptakan bencana besar perekonomian. Sehingga dalam problematika sanksi ini secara khusus penulis berargumen bahwa terdapat sektor-sektor hak asasi manusia yang dilanggar, karena kebijakan ini bersifat mematikan dan menimbulkan kelaparan di seluruh provinsi Afghanistan.

### Kerawanan Pangan

Gambaran eskalasi kerawanan pangan di Afghanistan dijelaskan dalam data FIES yang dihimpun oleh World Bank yang menerangkan bahwa terdapat 70% *food poverty rate* yang terjadi di Afghanistan. Persentase tersebut meningkat jauh dari data 2007 yang hanya berada di sekitar 30% total penduduk (World Bank, 2019). Kemudian dalam data yang sama juga dijelaskan bahwa persentase *food insecurity* mengalami peningkatan dari data tahun 2007-2008 sebanyak 28% menjadi

hampir 60% dari total penduduk di Afghanistan. Selanjutnya kerawanan pangan juga dijelaskan oleh World Bank (2019) melalui distribusi kalori, pada sektor ini menunjukkan bahwa pada konsumsi 20% kelompok termiskin di Afghanistan terjadi kelaparan yang tidak hanya minimal, tetapi telah mencapai maksimal, sedangkan untuk kelompok terkaya mengalami penurunan distribusi kalori yang juga bersifat signifikan

**Gambar 2. Poverty and food security, 2007-2016**



Sumber: Staff estimates based on NRVA 2007-08, NRVA 2011-12, and ALCS 2016-17 (NSIA)

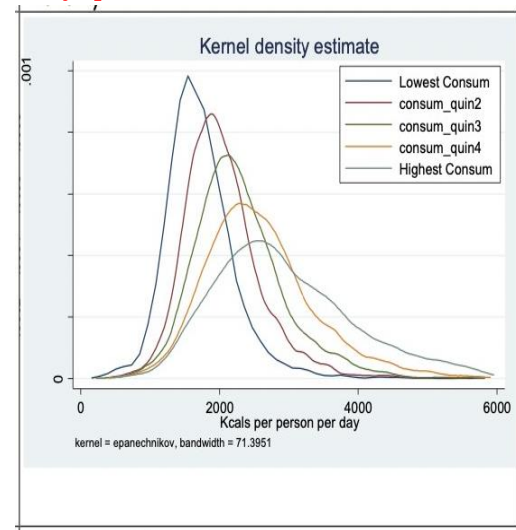
Masalah pangan di Afghanistan tergolong sebagai bencana pangan, karena disebabkan oleh banyak faktor, satu faktor utamanya adalah akses. Bantuan internasional berupa dana tidak dapat masuk dan produksi pertanian tidak dapat dilaksanakan karena adanya bencana kekeringan serta kemiskinan. Kerawanan pangan terus meningkat mulai dari bulan Juli 2021 sebesar 14 juta jiwa sehingga menjadi 23 juta populasi pada bulan Maret 2022. Data pembandingan yang dikeluarkan oleh PBB menjelaskan bahwa potensi kerawanan pangan dapat menjadi 30 juta populasi (UN, 2022).

Masalah lain yang menyebabkan kerawanan pangan di Afganistan adalah keterjangkauan bahan pokok (Goliaei et al, 2023). Situasi keuangan adalah faktor kritis utama kerawanan pangan. Kesenjangan antara sumber daya yang ada dan kebutuhan keluarga

dapat diatasi dengan upaya kolektif, termasuk meningkatkan dukungan sosial, memperbaiki sistem pangan, membuat lebih banyak makanan yang sesuai dengan etnis tersedia di toko, dan secara langsung melibatkan masyarakat dan lembaga pemukiman kembali dalam mendukung pendatang baru.

Kerawanan pangan juga terjadi akibat kebutuhan yang mendesak dimana para petani tidak memiliki ilmu yang cukup untuk meningkatkan ketahanan pangan (Samin et al, 2021). Faktor signifikan kerawanan pangan adalah tingkat pendidikan, rasio ketergantungan, dan pendapatan petani, akses ke pendapatan non-pertanian, unit ternak, keanggotaan organisasi petani, kredit informal, penyakit pertanian, banjir, dan perang. Rumah tangga petani dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang tinggi, pendapatan pertanian yang tinggi, akses ke pendapatan non-pertanian, dan unit peternakan besar cenderung tidak rawan pangan. Rumah tangga petani dengan ukuran rasio ketergantungan yang besar dan yang mengambil pinjaman dari sumber pedesaan informal lebih cenderung rawan pangan. Demikian pula, rumah tangga petani yang mengalami kekurangan pangan karena penyakit pertanian, banjir, dan perang secara signifikan terkait dengan kerawanan pangan. AS dalam hal ini juga langsung memberikan bantuan terhadap beberapa desa di Afghanistan (Beath, A., Christia, 2013). Amerika Serikat, dan sekutunya, PBB, LSM, dan Bank Dunia, telah menyuntikkan miliaran dolar ke dalam apa yang biasa disebut “rekonstruksi” Afghanistan sejak perang dimulai pada tahun 2001. (Lutz, C., & Desai, S, 2014).

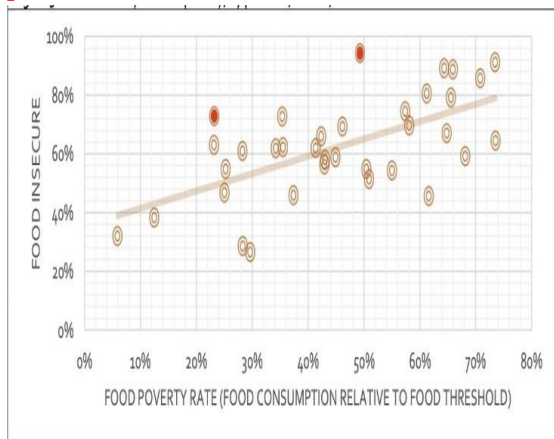
**Gambar 3. Distribution of calories by poverty quintile, 2016-17**



Sumber: Staff estimates based on ALCS 2016-17 (NSIA)

Bila dilihat lebih lanjut, data ini memaparkan temuan yang sangat mengesankan bahwa terjadi kekurangan bahan pangan di lebih dari 95% populasi dan berpotensi untuk menjadi 100% dalam beberapa waktu selanjutnya (UN, 2022). Faktor utama yang mengarahkan kepada kerawanan pangan menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (2022) dikarenakan adanya fenomena kehancuran ekonomi di Afghanistan, sehingga secara tidak langsung menciptakan kegagalan pada panen, kehancuran finansial, termasuk institusi keuangan negara. Kehancuran ekonomi di Afghanistan berimbas pada 80% penduduk berkaitan dengan kenaikan harga pangan dan minyak untuk transportasi dan distribusi pangan. Shoba Suri dan Mona (2021) menyebutkan bahwa harga pangan dan minyak menyebabkan meningkatnya data kemiskinan yang sebelumnya terdapat 54,5% masyarakat dibawah kemiskinan menjadi 72% di tahun 2020. Data tersebut juga didukung dengan pemaparan Human Capital Index yang menggambarkan Afghanistan menempati peringkat ke 148 dari total 178 negara terdata sebagai indeks pembangunan manusia terendah.

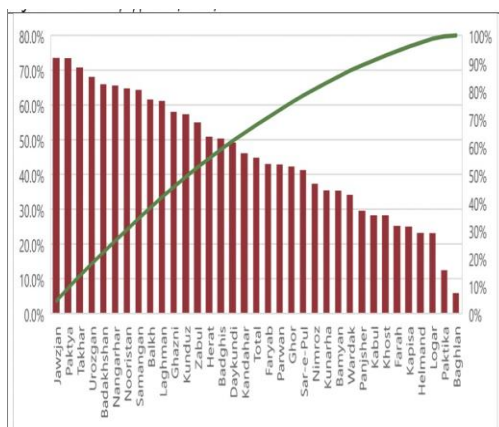
**Gambar 4. Food insecurity vs food poverty, by province, 2016-17**



Sumber: Staff estimates based on ALCS 2016-17 (NSIA)

Melalui Gambar 5 dijelaskan bahwa kerawanan pangan terjadi hampir di seluruh provinsi di Afghanistan (World Bank, 2019). Lebih dari 70% dari provinsi memiliki persentase diatas 50% dalam indeks kerawanan pangan, sedangkan 15 persen diantaranya mengalami pengecualian, berada dibawah 50%. Akan tetapi secara langsung World Bank (2019) menyebutkan bahwa mustahil terdapat provinsi yang memiliki indeks kerawanan pangan dibawah 50%, karena kemungkinan terdapat kekurangan data maupun kontradiksi yang terjadi saat pengumpulan data dalam beberapa provinsi tersebut.

**Gambar 5. Food insecurity by province, 2016-17**



Sumber : Staff estimates based on ALCS 2016-17 (NSIA)

Selanjutnya dalam data di gambar ke delapan dijelaskan lebih detail pada penggambaran *food insecurity* di keseluruhan provinsi Afghanistan. Data tertinggi mencapai 75% masyarakat Jawjan mengalami kerawanan pangan, begitu juga Paktya, sedangkan Takhar sebanyak 72%, kemudian yang terendah terdapat di Provinsi Baghlan yang hanya mengalami kerawanan pangan di penduduknya sekitar 5-8% populasi di tahun 2016-2017. Data-data yang dihimpun menurut penulis cukup untuk menjelaskan bagaimana kerawanan pangan terjadi di Afghanistan.

## KESIMPULAN

Melalui pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor internasional terutama argumentasi mengenai bagaimana Amerika Serikat menjadi sebuah negara hegemon dapat menciptakan bencana kelaparan di suatu negara, dalam kasus ini Afghanistan. Negara di Asia tersebut digolongkan oleh Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang dapat menjadi ancaman stabilitas negaranya, termasuk juga dunia internasional. Sehingga Amerika Serikat sebagai sebuah negara hegemon harus melakukan tindakan penertiban, tindakan tersebut dilakukan melalui invasi secara militer, transformasi doktrin kenegaraan dari negara otoriter monarki menjadi demokrasi. Kemudian selanjutnya Amerika Serikat juga menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi dan juga militer untuk melakukan hegemoni di Afghanistan. Sanksi ekonomi yang dilakukan berupa pembatasan perjanjian internasional, pembekuan akses perbankan di Afghanistan dan juga pembatasan bantuan internasional dari negara lain. Amerika Serikat sebagai hegemon berusaha untuk membuat Afghanistan tunduk dibawah aturannya, namun disisi lain juga menyebabkan banyak masalah, terutama kerawanan pangan akut yang terjadi hingga tahun 2022.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Niaz, R., & Amjad, M. (2020). Determinants of households' food insecurity with severity dimensions in Pakistan: Varying estimates using partial proportional odds model. *Health & Social Care in the Community*, 28(5), 1698-1709.
- Armitage, Richard Lee, Samuel R. Berger, Daniel Seth Markey, and Council on Foreign Relations. 2010. "U.S. Strategy for Pakistan and Afghanistan: Independent Task Force Report." (65):98.
- Beath, A., Christia, F., & Enikolopov, R. (2013). Empowering women through development aid: Evidence from a field experiment in Afghanistan. *American Political Science Review*, 107(3), 540-557.
- Dago, E. (2021) Armed conflicts and food insecurity - a short literature review. Montpellier (France): INRAe/CIRAD/Alliance of Bioversity International and CIAT. 14 p.
- Dirzauskaite, Goda dan Ilinca, Nicolae Cristinel (2017). Understanding "Hegemony" in International Relations Theories. Aalborg: Development and International Relations.
- Goliaei, Z., Gonzalez, M., Diaz Rios, K., Pokhrel, M., & Burke, N. J. (2023). Post-Resettlement Food Insecurity: Afghan Refugees and Challenges of the New Environment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(10), 5846.
- Lutz, C., & Desai, S. (2014). US reconstruction aid for Afghanistan: The dollars and sense. Watson Institute for International Studies Research Paper, (2014-22).
- Mughal, M., & Fontan Sers, C. (2020). Cereal production, undernourishment, and food insecurity in South Asia. *Review of Development Economics*, 24(2), 524-545.
- Nuechterlein, Donald E (1989). Interest in the Middle East: Is the Persian Gulf a "Bridge too Far"? War College Review. Winter Vol. 42. No. 1. <https://www.jstor.org/stable/44642376>
- Samim, S. A., Hu, Z., Stepien, S., Amini, S. Y., Rayee, R., Niu, K., & Mgendi, G. (2021). Food insecurity and related factors among farming families in Takhar region, Afghanistan. *Sustainability*, 13(18), 10211.
- Tierney, Dominic (2005). "Irrelevant of Malevolent? UN arms embargoes in civil wars". *Review of International Studies*. 31 (4): 649.
- US Department of Defense (2022). Message to the Force - One Year Since the Conclusion of the Afghanistan War. defense.gov.
- World Bank (2019). Official Document: Hunger Before The Drought: Food Insecurity in Afghanistan. Working Paper. Vol 1.
- Venditti, Bruno (2021). *Interactive Map: Tracking World Hunger and Food Insecurity*.
- Human Right Watch (2022). Afghanistan: Economic Crisis Underlies Mass Hunger. hrw.org. <https://www.hrw.org/news/2022/08/04/afghanistan-economic-crisis-underlies-mass-hunger>
- <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3144082/message-to-the-force-one-year-since-the-conclusion-of-the-afghanistan-war/>
- <https://www.voanews.com/a/ready-explaining-us-sanctions-against-taliban-/6427771.html>
- <https://news.un.org/en/story/2022/03/1113982>
- United Nations (2022). Afghanistan: Food Insecurity and Malnutrition Threaten 'an entire generation'. news.un.org.
- visualcapitalist.com. 2021\ <https://www.visualcapitalist.com/interactive-map-tracking-global-hunger-and-food-insecurity/>.
- Voice of America (2022). *Explaining US Sanctions Against Taliban*. voanews.com.